

KEBIJAKAN PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017

Oleh : Nur Adila Arazi

Email : adilaarazi.aa98@gmail.com

Pembimbing : Erman M, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

Abstract

Almost all big cities in Indonesia are jammed with homeless people and beggars, including Pekanbaru City. To overcome the problems of homelessness and beggars, it is necessary to intervene by the Regional Government, especially Pekanbaru City and the Pekanbaru City Social Service to handle homeless people and beggars, one of which is done by formulating Pekanbaru City Government Policy, namely by making Pekanbaru City Regional Regulation Number 12 of 2008 concerning Social Order. The reason for the issuance of the Pekanbaru City Regional Regulation No. 12 of 2008 is to address welfare problems in Pekanbaru City, which in this study will focus on fostering homeless people and beggars.

Whatever the purpose of this research is to find out how the policies for the development of the homeless and beggars in 2017 and the inhibiting factors for the development policies of the homeless and beggars. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. In collecting data, the writer used interview and documentation techniques.

Based on the results of research and findings in the field regarding the policy of fostering homeless people and beggars in Pekanbaru City in 2017, it has not been running optimally which has led to the return of homeless people and beggars after receiving guidance. The impact of the coaching policy carried out by the Pekanbaru City Social Service has not yet been felt in reducing the number of homeless and beggars because the training carried out by the Pekanbaru City Social Service only provides mental coaching for a short time and in skills training activities it no longer runs. Inhibiting factors in carrying out coaching homeless people and beggars, both from internal and external factors. From internal factors, namely: Limited budget, absence of social rehabilitation centers belonging to the Regional Government. External factors, namely there are still many people who give money to homeless people and beggars, there is no cooperation from the private sector or business entities to carry out special skills training for homeless and beggars.

Keywords: Policy, Development, Homeless, Beggars

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hampir seluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia di jamuri dengan gelandangan dan pengemis, tidak terkecuali Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru tumbuh secara baik dan bahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis perlu adanya campur tangan Pemerintah Daerah khususnya Kota Pekanbaru beserta Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk melakukan penanganan terhadap gelandangan dan pengemis salah satunya dilakukan dengan cara merumuskan Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu dengan dibuat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. Alasan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 ini adalah untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan di Kota Pekanbaru yang dalam penelitian ini akan difokuskan pada pembinaan gelandangan dan pengemis. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 pasal 8 ayat 4 Dinas Sosial Kota Pekanbaru harus melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis yang terjaring razia. Adapun bentuk pembinaan yang harus diberikan yaitu:

a. Pembinaan Mental

Bentuk pembinaan mental berupa sosialisasi yang dilakukan dengan motivasi, penyuluhan tentang hukum dan agama. Tujuan pembinaan ini adalah untuk memotivasi para gelandangan dan pengemis untuk mengurangi tingkat kemalasan dan adanya rasa malu melakukan aktifitasnya.

b. Pembinaan pelatihan keterampilan

Pemberian pelatihan keterampilan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas keterampilan serta membuka peluang pekerjaan untuk gelandangan dan pengemis, sehingga mereka tidak akan melakukan aktifitas gelandangan dan mengemis lagi.

Tabel 1.1
Kegiatan Pembinaan Bagi
Gelandangan dan Pengemis Kota
Pekanbaru Tahun 2013-2019

No	Tahun	Kegiatan Pembinaan	Yang dibina (gepeng tempatan)
1	2013	Bimbingan mental dan pelatihan keterampilan sol sepatu	20 orang
2	2014	Bimbingan mental dan pelatihan keterampilan olah pangan	20 orang
3	2015	Pembinaan mental dan dan pelatihan keterampilan sol sepatu	20 orang
4	2016	Pembinaan mental dan pelatihan keterampilan	30 orang
5	2017	Pembinaan mental	25 orang
6	2018	Pembinaan mental	15 orang
7	2019	Pembinaan mental	20 orang

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2020

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2013-2016 Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan pembinaan berupa pembinaan mental dan pelatihan keterampilan sedangkan pada tahun 2017-2019 Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya melakukan pembinaan berupa pembinaan mental dan tidak ada dilakukannya pelatihan keterampilan. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Bab V Tentang Penertiban dan Pembinaan Pasal 8 Ayat 4. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada gelandangan dan pengemis yang berada di Kota Pekanbaru masih hanya bersifat non panti, karena hingga saat ini pemerintah belum memiliki panti sosial khusus gepeng di Kota Pekanbaru. Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya mempunyai satu *shelter* berbentuk seperti rumah yang memiliki kapasitas yang sedikit sehingga pembinaan yang dilakukan juga hanya sebentar selama 3-7 hari kemudian dipulangkan ke keluarga masing-masing sehingga tidak ada efek jera yang dirasakan oleh gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pembinaan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Kebijakan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru Tahun 2017”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah di jelaskan maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru Tahun 2017?

2. Apa saja faktor-faktor penghambat Kebijakan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru Tahun 2017?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengidentifikasi bagaimana Kebijakan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru Tahun 2017.
- b. Untuk mengidentifikasi Kebijakan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru Tahun 2017.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan Ilmu Pemerintahan dan kajian kebijakan publik secara umum, serta secara khusus mengenai tindakan implementasi terhadap suatu kebijakan.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan berharga bagi pemerintah atau lembaga-lembaga yang membutuhkan, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian-penelitian pada bidang yang sama dimasa yang akan datang.

KONSEP TEORI

Implementasi Kebijakan

Merilee S. Grindle¹ menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasinya kebijakan dilakukan.² Keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Grindle juga amat ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut yang terdiri atas *content of policy* dan *context of implementation*.

1. *Content Of Policy* menurut Grindle adalah :³

a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi).

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan

tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

- b. *Type Of Benefit* (tipe manfaat)
Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- c. *Extent Of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)
Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
- d. *Site Of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
- e. *Program Implementator* (pelaksana program)
Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya

¹ Grindle, Merilee S.(Ed). *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, (New Jersey: Princetown University Press, 1980),hlm.7

² Riant Nughroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hlm. 174

³ Leo Agustino, op.cit, hlm 143

pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

- f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. *Context Of implementation* menurut Grindle adalah:⁴

- a. *Power, interest, and strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

- b. *Institution And Regime Characteristic* (karakteristik Lembaga dan rezim yang berkuasa). Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu Lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c. *Compliance And Responsiveness* (tingkat

kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Kemudian menarik ke permukaan sebagai ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu.

3.2.Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru. Dibandingkan kota lain di provinsi Riau Kota Pekanbaru adalah yang terdapat gelandangan dan pengemis yang paling banyak. Selain itu Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tumbuh secara baik dan bahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sehingga banyak orang-orang yang datang ke Kota Pekanbaru untuk mencari pekerjaan akan tetapi karena tidak mendapatkan pekerjaan mereka terpaksa harus menjadi gelandangan dan pengemis.

3.3.Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada wawancara, khususnya wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan secara informal. Biasanya wawancara ini digunakan bersamaan dengan metode observasi partisipasi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Pohan adalah cara pengumpulan informasi yakni

⁴ Leo Agustino, op.cit, hlm 143

peninggalann tertulis, arsip-arsip, ijazah, rapor, peraturan undng-undang, buku hain, surat-surat priadi, atasn biografi dan lain-lainn yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteiti.⁵

3. Sumber Data

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi itu dapat diperoleh.

Informan penelitian :

- a. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru
- b. Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Pekanbaru
- c. Komisi III DPRD Provinsi Riau

3.4. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer dalam penelitian ini di peroleh langsung dari Responden yaitu Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang didapat dari wawancara oleh penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah data primer. Artinya, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain

3.5. Teknik Analisis Data

⁵ Prastowo, *Op.Cit.*, 212

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan.

Menurut Miles dan Hubberman analisis digambarkan menjadi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁶

Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif meliputi :

1. **Reduksi Data** (*data reduction*), reduksi data adalah mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan, serta dari bahan-bahan kepustakaan, setelah terkumpul data tersebutn kemudian diolah dengan terlebih dahulu menyeleksi dan mengklarifikasinya secara logis dan sistematis.
2. **Penyajian Data** (*data display*) setelah data-data tersebut terkumpul , hal yang harus dilakukan adalah melakukan pengkajian terhadap bahan yang diperoleh dari hasil wawancara serta studi kepustakaan dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan konsep-konsep yang terkandung dalam penelitian tersebut.
3. **Penarikan Kesimpulan** (*conclusion drawing/ verification*).
Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data

⁶ Matthew B. Miles Dan A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), Hlm. 16

yang diperolehnya. Untuk maksud itu, ia berusaha mencari pola, model, tema hubungan, persamaan, hal yang sering muncul, hipotesis, dan sebagainya. Jadi, dari data yang didapatnya itu, ia mencoba mengambil kesimpulan. Mula-mula kesimpulan itu kabur, tetapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung data baru. Verifikasi data dilakukan dimulai dari proses pengumpulan data sampai dengan proses penyajian data. Setelah itu menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kebijakan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru Tahun 2017

4.1.1 Isi Kebijakan (*Content Of Policy*)

Adapun konteks dari isi kebijakan menurut teori Implementasi Kebijakan menurut Grindle sebagai berikut:

4.1.1.1 Kepentingan-Kepentingan Yang Mempengaruhi

Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis dapat kita lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Pihak – Pihak yang Memiliki Kepentingan Terkait Kebijakan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Tahun 2017

No	Pihak-Pihak	Kepentingan	Program
1	Pemerin	1. Tercipta	1. Pelayanan

	tah Kota Pekanbaru	ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat. 2. Penurunan jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru 3. Berubahnya pola pikir gelandangan dan pengemis untuk meninggalkan pekerjaannya.	an dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2	Gelandangan dan Pengemis	1. Mendapatkan pelayanan sosial dari pemerintah .	1. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel di atas kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi menurut penulis kepentingan-kepentingan yang dibawa oleh dua pihak. Kepentingan tersebut dibawa dalam memenuhi pelaksanaan kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis seperti pemerintah Kota Pekanbaru memiliki kepentingan

terciptanya ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat Kota.

4.1.1.2 Tipe Manfaat

Dilihat dari tipe manfaat kebijakan pembinaan belum mampu menunjukkan manfaat yang positif bagi gelandangan dan pengemis. Hal ini bisa dilihat dari gelandangan dan pengemis yang telah mendapatkan pembinaan kembali melakukan aktivitas tuna sosialnya sehingga tidak muncul rasa malu untuk tidak mengelandang dan mengemis.

4.1.1.3 Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Derajat perubahan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah dengan adanya kebijakan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis ini adalah berkurang atau bahkan hilangnya gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.

Belum tercapainya derajat perubahan yang diinginkan hal ini dapat dilihat dari jumlah gelandangan yang setiap tahunnya meningkat padahal tujuan adanya kebijakan pembinaan ini untuk tercapainya tujuan Kota Pekanbaru bebas dari Gelandangan dan Pengemis. Berikut adalah jumlah data gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.

Tabel 3.5

Data Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru Tahun 2015-2017

No	Tahun	Gelandangan	Pengemis	Jumlah Gelandangan dan pengemis yang Terjaring
1	2015	22 orang	61 orang	83 orang
2	2016	28 orang	53 orang	81 orang
3	2017	29 orang	55 orang	84 orang
Jumlah		79 orang	169 orang	248 orang

sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat ada peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru, tapi menurut Dinas Sosial Kota Pekanbaru itu belum semua gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru yang terdata karena pada saat penjaringan masih banyak gelandangan dan pengemis yang belum tertangkap, karena ada beberapa gelandangan dan pengemis yang bersembunyi pada saat razia dilakukan, setelah selesai Satpol PP melakukan razia mereka mulai beraksi ditempat-tempat umum atau jalanan. Jika dilihat dari indikator derajat yang ingin di capai belum maksimal karena belum terlihat penurunan jumlah gelandangan dan pengemis yang signifikan di Kota Pekanbaru.

4.1.1.4 letak pengambilan keputusan

Dalam proses penanganan gelandangan dan pengemis akan dilakukan penertiban/razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dibantu pihak kepolisian dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Setelah dilakukan razia akan dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan pemulangan gepeng. Bagi gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar Kota Pekanbaru akan dipulangkan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau jika gelandangan dan pengemis berasal dari Kota Pekanbaru akan dipulangkan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

4.1.1.5 Pelaksana Program

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial telah dijelaskan bahwa lembaga atau instansi yang menjadi implementor dalam melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis

adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru, sedangkan untuk penertiban dilapangan dilakukan oleh Satpol PP dibantu pihak kepolisian.

4.1.1.6 Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

dilihat dari jumlah pelaksana pembinaan sudah cukup akan tetapi untuk melakukan pelatihan keterampilan Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum memiliki sumber daya manusia yang mengerti akan hal itu

b. Sumber Daya Finansial

Pada tahun 2017 tidak ada dilakukannya pemberian pelatihan keterampilan dan modal usaha terhadap gelandangan dan pengemis. Hal ini disebabkan karena terbatasnya tempat penampungan dan kurangnya dana yang dimiliki untuk melakukan pelatihan.

c. Fasilitas

Dilihat dari sarana dan prasarana pendukung untuk luar panti yang dimiliki oleh Dinas Sosial dalam mengimplementasikan pembinaan gelandangan dan pengemis, fasilitas yang dimiliki belum cukup memadai. Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum memiliki tempat pembinaan yang cukup untuk menampung dan membina gelandangan dan pengemis yang telah diamankan oleh satpol PP. Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya mempunyai satu *shelter* yang berbentuk seperti rumah, Untuk pembinaan yang bersifat panti belum bisa dilaksanakan karena belum tersediannya panti sosial khusus gelandangan dan pengemis yang mampu menampung banyak gelandangan dan pengemis untuk kurun waktu yang cukup lama sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembinaan dan pelatihan tersebut.

4.1.2 Konteks Implementasi (*Context Of Implementation*)

Adapun konteks implementasi menurut teori implementasi kebijakan Grindle sebagai berikut:

4.1.2.1 Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat

Pada kategori ini dijelaskan bahwa tidak ada kekuasaan yang mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis, seperti syarat-syaatnya atau prosedur penggunaannya karena semua aktor yang terlibat dalam pembinaan gelandangan dan pengemis ini hanya menjalankan dan mengikuti Peraturan Daerah,

4.1.2.2 Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa

Tabel 4.2
Pembagian Tugas Dinas Sosial Kota Pekanbaru Bidang Rehabilitasi Sosial

Dinas	Bidang	Tugas
Dinas Sosial Kota Pekanbaru	Rehabilitasi Sosial	Melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis
		Melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis yang terjaring razia

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2020

Berdasarkan tabel diatas bisa disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru selain melakukan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis juga melakukan penertiban, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial

pasal 8 ayat 1 bahwa yang melakukan penertiban yaitu Satpol PP dan Kepolisian, Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya melakukan pembinaan.

4.1.2.3 Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana

Tingkat kepatuhan dari gelandangan dan pengemis terhadap kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial untuk dilarang menggelandang dan mengemis belum patuh. Dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat untuk mendukung kesuksesan dari kebijakan ini masih sangat kurang, Keterlibatan lembaga – lembaga sosial yang ada di Pekanbaru belum membantu dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, lembaga sosial seperti panti sosial khusus untuk gelandangan dan pengemis belum ada di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial pasal 9 pihak swasta maupun dunia usaha dihimbau untuk peduli dan berperan aktif dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kerjasama pihak swasta dengan pemerintah untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis ini

4.2. Faktor-Faktor Penghambat Kebijakan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru Tahun 2017

Faktor Internal

1. Anggaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Penulis melihat bahwa bahwa butuh penganggaran khusus yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani gelandangan dan pengemis. Karena kurangnya anggaran pendanaan

dari pemerintah yang dirasa oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, sehingga menyebabkan tidak semua program pembinaan dan pelatihan yang direncanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru terlaksana. Butuh alokasi khusus dalam penganggaran APBD untuk khusus menangani masalah tuna sosial di Kota Pekanbaru agar setiap tahun pemerintah punya langkah konkrit yang bisa dilakukan tanpa harus beralasan pada minimnya anggaran.

2. Belum Adanya Tempat Penampungan yang Mumpuni

belum adanya sarana dan prasarana yang representif untuk melaksanakan pembinaan bagi gelandangan dan pengemis sehingga gelandangan dan pengemis yang terjaring razia tidak dilakukan pembinaan sesuai dengan isi dari kebijakan. Dengan tidak adanya panti sosial khusus gelandangan dan pengemis menyebabkan pembinaan yang dilakukan hanya bisa sebentar, jika sudah ada panti sosial maka gelandangan dan pengemis bisa mendapatkan pembinaan dengan jangka waktu yang lebih lama dan bisa melakukan pelatihan keterampilan sesuai dengan minat gelandangan dan pengemis itu sendiri.

Faktor Eksternal

1. Budaya dan Kebiasaan Masyarakat pada Umumnya

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial Pasal 3 Ayat 2 sudah ditetapkan bahwa masyarakat dilarang untuk memberikan sumbangan dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis. Tetapi yang bisa kita lihat hingga sekarang masyarakat masih banyak yang memberi uang terhadap gelandangan dan pengemis. masyarakat merasa iba terhadap gelandangan dan

pengemis yang berada di jalanan serta asumsi mayoritas masyarakat memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis mempunyai nilai ibadah. Dengan masih banyaknya masyarakat yang memberi uang sehingga gelandangan dan pengemis tersebut semakin nyaman dan senang untuk melakukan aktifitas tuna sosialnya hal ini mengakibatkan tidak ada efek dari pembinaan yang telah diberikan kepada mereka

2. Belum Adanya Campur Tangan Dunia Usaha

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Pasal 9 Dunia usaha dihimbau untuk peduli dan berperan aktif dalam penanganan gelandangan dan pengemis lokal melalui program sosial yang ada diperusahaannya, akan tetapi hingga saat ini belum ada campur tangan dunia usaha dalam menangani gelandangan pengemis termasuk pemberian keterampilan dan modal usaha.

5.PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis pada tahun 2017 belum berjalan dengan maksimal karena masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang kembali setelah mendapatkan pembinaan. Kemudian dalam kegiatan pelatihan keterampilan tidak berjalan lagi hal ini dikarenakan kurangnya dana serta belum adanya lahan untuk melakukan pelatihan keterampilan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas, maka peneliti dapat memberi saran:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru hendaknya segera membuat sarana prasana pendukung panti sosial bagi gelandangan dan pengemis.
2. Pemerintah daerah harus benar benar serius melihat aspek penganggaran dan kesiapan sarana prasana sebagai faktor penting terlaksananya sebuah program atau kebijakan. Maka butuh keseriusan baik Pemerintah eksekutif maupun legislatif membahas penganggaran dalam rancangan APBD khusus untuk mengentaskan masalah tuna sosial ini, dari penggaran tersebut harus juga dialokasikan untuk kesiapan membangun *shelter* khusus milik pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Masyarakat harus sadar akan arti penting peraturan yang ada agar kebijakan tersebut dapat terimplementasi dengan baik. Pemerintah harus berperan dalam upaya menyadarkan masyarakat akan arti penting peraturan. Dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan, pembiasaan-pembiasaan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran terhadap kebijakan tersebut.
4. Pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya mempertegas sanksi yang ada di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial pasal 3 mengenai larangan memberikan uang kepada gepeng yang

- meminta-minta dan merealisasikan sanksi tersebut.
5. Dinas sosial Kota Pekanbaru perlu melakukan pelatihan keterampilan dan memberikan bantuan modal usaha kepada para gelandangan dan pengemis yang terjaring razia agar mereka mempunyai modal untuk mendapatkan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta
- Ahmad, Ruslam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Bungin, Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Prenada Media Grup
- Endang, Soetari. 2014. *Kebijakan Publik (Pengantar)*. Bandung: Pustaka Setia
- Gaouzali, Saydam. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Suatu Pendekatan Mikro)*. Jakarta:Djambatan
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer E (Ed). 1991. *Urbanisasi Pengangguran, dan Sector Informal Di Kota*. Jakarta:PT YOI
- Marbun, B.N. 1979. *Kota Indonesia Masa Depan: Masalah Dan Prospek*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Merilee, Grindle (Ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press
- Miles, Mattew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang MetodeMetode Baru*. Jakarta: UI Press
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakir. 2001. *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almansyur. 2016.,*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Prayitno, Ujjianto S. 2010. *Memerangi Kemiskinan Dari Orde Baru Sampai Reformasi*. Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Suparno. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek*. Sidoarjo : Dwiputra Pustaka Jaya

Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Jurnal

Deli, Yuki. 2014. *Efektivitas Pembinaan Dan Pelatihan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosia Dan Pemakaman Kota Pekanbaru*”, JOM Fisip. Vol.2 No.1

Junaidy ,Robby Kurniawan. 2014. *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008)*, JOM Fisip, Vol. 1 No. 2

Purnama, Andrio Dan Febri Yuliani. 2015. *Pelaksanaan Pembinaan Dan Pelatihan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru*. JOM Fisip. Vol. 2 No.1

Suri, Dia Meirina. 2017. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penertiban Dan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru*. Jurnal PUBLIKA. Vol. 3 No. 1

Tobing, Ester Meilin. 2017. *Kinerja Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Menangani Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru*. JOM Fisip. Vol.4 No 1

Skripsi

Apiantara, Adhe Akbar. 2017. *Usaha Dinas Sosial Dan Pemakaman Dalam Penanganan Eks Penyandang Tuna Sosial (Gelandangan Dan Pengemis) Di Kota Pekanbaru Tahun 2015*. Skripsi. Pekanbaru: UNRI

Fadillah, Nur. 2019. *Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitas Sosial Bagi Disabilitas Mental Oleh Unit Pelaksana Teknis Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2018*. Skripsi. Pekanbaru: UNRI

Website

Riaulink.com. 2018. “*Dinilai Meresahkan, Dinas Sosial Pekanbaru Akan Tindak Gepeng Yang Berkeliaran Di Lampu Merah*”. Diakses pada 11 Desember 2019 dari <https://riaulink.com/news/detail/4149/dinilai-meresahkan-dinas-sosial-pekanbaru-akan-tindak-gepeng-yang-berkeliraran-di-lampu-merah>